



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jl. Jenderal Achmad Yani No.114

Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065

Web: pt-pontianak.go.id – Email: pengadilantinggipontianak@gmail.com

PONTIANAK 78124

Pontianak, 21 Desember 2022

Nomor : W17-U/ ~~3394~~/OT.01.2/12/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau dimaksudkan untuk:
 - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh nilai sebesar **70,10** atau **BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2021
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,99	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,38	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,92	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,08	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,36	70,10
Predikat			BB	BB

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum ada pedoman teknis perencanaan kinerja intenral yang mencakup antara lain tugas fungsi, IKU, PK berjenjang, rencana aksi monev dan pengukuran kinerja berkala.
2.	Reviu Rencana Strategis belum melampirkan dokumen matriks pendanaan dan RKA-KL selama tahun anggaran 2021.
3.	Belum ada perencanaan kinerja yang menggambarkan pohon kinerja (cascading) untuk mencapai tujuan organisasi (proses bisnis).
4.	Belum ada dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT) yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
5.	Tidak ada data dukung Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (pohon kinerja/cascading)
6.	Tidak ada data dukung Dokumen Perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
7.	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis / Reviu IKU).
8.	Tidak ada Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai tahun 2021
9.	Belum ada dokumen SOP pada masing-masing indikator apakah telah mendukung kinerja yang ingin dicapai
10.	Belum melampirkan laporan capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas untuk periode tahun 2021.
11.	Belum melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang memuat : dasar, tujuan, manfaat, tuisi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)
2.	Belum melampirkan pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, hanya terdapat SK tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3.	Belum melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
4.	Data kinerja yang dikumpulkan belum memuat data dukung berupa e-Monev Bappenas (Eselon I) dan belum melampirkan data dukung/screenshot Capaian Kinerja melalui aplikasi SIPP dan MIS selama tahun 2021.
5.	Belum menampilkan data dukung bahwa organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
6.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) seperti Komdanas, SIPP, MIS namun belum menampilkan data dukung selama tahun 2021.
7.	Tidak ada Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan untuk tahun 2021.

8.	Tidak ada Dokumen Baperjakat sehingga tidak diketahui apakah Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam memutuskan penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
9.	Tidak diketahui apakah pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi sesuai Perma 7 Tahun 2015 karena tidak melampirkan data dukung
10.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, dimana belum melaksanakan dan belum melampirkan dokumen rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen dan dokumen reviu SOP.
11.	Tidak diketahui apakah Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran, karena belum melampirkan data dukung berupa revisi RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2021
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Tidak ada dokumen LKjIP tahun sebelumnya (tahun 2021)
	Belum ada Dokumen reviu LKjIP (Tindak Lanjut LHE telah direviu Pengadilan Tinggi Pontianak)
2.	Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum menjelaskan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
3.	Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional.
4.	Belum melampirkan data dukung Capaian Bulanan/Triwulan Tahun 2021 yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
5.	Belum melampirkan data dukung Capaian Bulanan/Triwulan yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Tidak ada data dukung dokumen Laporan Hasil Evaluasi internal pertriwulan perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi)
2.	Tidak ada data dukung Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Bagian/Sub.Bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang
3.	Belum melampirkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi sehingga tidak diketahui apakah evaluasi dilaksanakan sesuai pedoman/standar, dilakukan setiap PK Sub.bag/bagian/pimpinan sesuai juknis dan SOP
4.	SK Tim penyusun SAKIP sudah ada, namun belum melampirkan sertifikat diklat kegiatan pelatihan SAKIP.
5.	Belum melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
6.	Belum melampirkan data dukung apakah hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja juga untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

No	Rekomendasi	
A. Perencanaan Kinerja		
1.	Poin 1A No. 1	Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain tugas fungsi, IKU, PK berjenjang, rencana aksi monev dan pengukuran kinerja berkala.
2.	Poin 1A No. 6	Reviu Rencana Strategis yang menjabarkan matrik pendanaan dan melampirkan RKA-KL selama tahun anggaran 2021.
3.	Poin 1B No. 3	Perlu disusun pohon kinerja level unit untuk menggambarkan keselarasan pencapaian kinerja organisasi pada level tujuan (<i>impact/ultimate outcome</i>), sasaran strategis (<i>intermediate outcome</i>), sasaran program (<i>outcome</i>) dan sasaran kegiatan (input) pada indikator kinerja sehingga dapat tergambar dari setiap sasaran strategis
4.	Poin 1B No. 6	Menyusun dan melampirkan Dokumen Reviu IKU
5.	Poin 1B No. 8	Perlu menyusun dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
6.	Poin 1B No. 9	Perlu menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
7.	Poin 1B No. 11	Agar melampirkan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai tahun 2021
8.	Poin 1C No. 2	Membuat dokumen SOP pada masing-masing indikator apakah telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dan memuat kegiatan dan aktivitas yang dilakukan efektif sesuai tujuan yang dicapai, jadwal aktivitas kerja sejalan dengan upaya mencapai target dan pelaksanaan kerja terjadwal dan terorganisir
9.	Poin 1C No. 3-4	Untuk menyusun dan melampirkan laporan capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi Komdanas untuk periode tahun 2021.
10.	Poin 1C No. 7-8	Untuk menyusun dan melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
B. Pengukuran Kinerja		
1.	Poin 2A No. 1	Agar menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang memuat : dasar, tujuan, manfaat, tuisi sesuai proses bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab (dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi)
2.	Poin 2A No. 3 Poin 2B No. 3	Belum melampirkan pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang sudah diformalkan, dapat diandalkan dan <i>up to date</i> .
3.	Poin 2B No. 1 Poin 2C No. 9-10	Agar menyusun dan melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
4.	Poin 2B No. 5	Melampirkan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi e-Monev Bappenas yang terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 03 yang telah

		diformalkan, juga melampirkan data dukung/screenshot Capaian Kinerja melalui aplikasi SIPP dan MIS
5.	Poin 2B No. 6-7	Agar melampirkan bukti pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui aplikasi Komdanas, SIPP, MIS selama tahun 2021.
6.	Poin 2C No. 1	Agar menyusun dan melampirkan Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan pada tahun 2021 yang digunakan dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
7.	Poin 2C No. 2	Agar menyusun dan melampirkan Dokumen Baperjakat dalam menentukan penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
8.	Poin 2C No. 3	Agar melampirkan data dukung mengenai apakah pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi sesuai Perma 7 Tahun 2015
9.	Poin 2C No. 4-5	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, dimana belum melaksanakan dan belum melampirkan dokumen rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manajemen dan dokumen revidi SOP.
10.	Poin 2C No. 6-8	Agar menyusun dan melampirkan hasil revidi revisi anggaran yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Poin 3A No.2	Agar menampilkan Dokumen LKjIP tahun sebelumnya (tahun 2021)
2.	Poin 3A No. 4	Dokumen Laporan Kinerja harus memuat bukti berupa dokumen revidi LKjIP (Tindak Lanjut LHE telah direvidi Pengadilan Tinggi Pontianak)
3.	Poin 3B No. 4	Informasi kinerja dalam laporan kinerja perlu menjelaskan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
4.	Poin 3B No. 6	Informasi kinerja dalam laporan kinerja perlu untuk dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional, khususnya di lingkungan peradilan umum.
5.	Poin 3C No.1-2	Untuk menyusun dan melampirkan data dukung dokumen rapat capaian kinerja secara berkala yang memuat undangan, daftar hadir, notulensi, foto kegiatan selama tahun 2021.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Poin 4A No. 2-3 Poin 4B No. 1 Poin 4C No. 1-4	Menyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus dilaksanakan sesuai pedoman/standar, dilakukan setiap PK Subbagian/pimpinan sesuai juknis dan SOP dan didalamnya melampirkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

2.	Poin 4B No. 2	Agar melampirkan sertifikat diklat kegiatan pelatihan SAKIP dan meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dalam hal implementasi SAKIP dengan menugaskan personil pegawai untuk mengikuti Diklat SAKIP.
----	---------------	---

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Sanggau segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI